

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Undang-Undang Otonomi Daerah 1999). Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi dan keterpaduan antar sektor tersebut di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk menyesuaikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

Secara makro pertumbuhan atas kenaikan PDRB dari tahun ketahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, dimana dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu :

1. Sektor pertanian
2. Sektor Pertambangan dan penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas dan Air bersih
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Angkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Sektor Jasa-jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut diatas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor ekonomi merupakan hasil perencanaan serta pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
PDRB PROPINSI JAWA BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
MENURUT KABUPATEN / KOTA, 1996-2000 (JUTAAN RUPIAH)

KABUPATEN / KOTA	1996	1997	1998	1999	2000
Pandeglang	1.051.552,90	1.086.227,42	1.001.611,67	1.079.958,65	-
Lebak	985.020,99	1.007.560,56	907.808,51	930.882,81	-
Bogor	6.465.438,96	6.773.654,27	5.370.468,71	5.455.735,88	-
Bogor	-	-	-	-	4.305.987,03
Depok	-	-	-	-	1.298.090,66
Sukabumi	2.136.986,46	2.205.338,43	1.966.650,35	1.998.979,74	2.248.638,24
Cianjur	1.992.994,63	2.006.086,13	1.930.776,46	1.968.939,42	2.053.638,70
Bandung	7.513.142,71	7.883.716,92	6.340.795,10	6.529.082,43	6.871.873,92
Garut	2.240.596,55	2.308.398,10	2.039.659,65	2.091.122,58	2.172.574,20
Tasikmalaya	2.096.347,83	2.172.211,37	1.885.284,08	1.928.080,94	2.147.441,29
Ciamis	2.052.801,95	2.128.518,12	1.940.467,88	1.986.388,21	2.038.969,49
Kuningan	896.980,00	928.016,26	875.472,25	886.579,46	911.372,86
Cirebon	1.772.430,44	1.832.148,93	1.451.612,99	1.503.946,41	1.579.838,54
Majalengka	1.091.827,00	1.147.606,63	1.040.316,22	1.076.621,39	1.126.602,18
Sumedang	1.090.687,50	1.122.127,60	989.773,02	1.013.470,17	1.053.006,84
Indramayu	5.663.225,45	5.286.849,84	5.000.034,50	4.510.766,90	4.486.802,36
Indramayu ₁	1.695.897,04	1.728.764,84	1.547.427,58	1.663.028,28	2.589.562,36
Subang	1.667.729,00	1.722.416,80	1.598.891,03	1.635.275,00	1.794.596,22
Purwakarta	980.759,95	1.001.253,78	884.193,30	901.656,35	1.952.611,56
Karawang	2.798.437,00	2.924.863,00	2.345.950,00	2.477.859,00	2.793.987,67
Bekasi	5.992.233,48	6.407.593,22	5.038.758,81	5.127.351,69	8.657.823,63
Tangerang	4.043.728,63	4.284.215,22	3.887.337,49	3.969.481,31	-
Serang	5.419.277,86	5.653.568,23	4.838.098,00	4.876.679,00	-
Bogor	1.045.309	1.098.516	915.583	945.634	1.145.689,01
Sukabumi	514.817,35	534.714,05	443.006,41	457.169,19	479.190,14
Bandung	6.311.148,18	6.593.226,60	5.294.952,14	5.443.350,84	5.738.002,56
Cirebon	1.201.789,25	1.281.588,06	1.212.894,93	1.240.699,36	1.353.876,06
Tangerang	6.144.189,22	6.823.921,80	5.680.177,00	5.829.210,00	-
Bekasi	3.649.657,00	3.857.794,00	3.060.637,00	3.141.178,00	3.359.448,00
Jml 26 Kab, / Kota	76.819.109,70	80.132.131,00	67.941.210,75	69.006.098,48	59.552.312,16
Jml 26 Kab./Kota ₁	72.851.781	76.574.046,00	64.488.603,00	66.128.359,86	57.655.072,16
PROPINSI	68.234.530,00	71.568.924,02	58.847.840,13	60.200.704,78	55.568.752,00
PROPINSI ₁	64.736.936,00	68.010.839,02	55.266.773,13	57.287.830,28	51.310.838,00

Sumber : BPS Jawa Barat Berbagai Terbitan

Catatan : 1) tidak termasuk Minyak Bumi dan Gas

Pada tabel 1.1 dapat memberi gambaran kepada kita keberhasilan setiap daerah kabupaten di Jawa Barat dalam melaksanakan strategi perencanaan pembangunan daerah masing-masing terlihat pada pertumbuhan PDRB. Ketimpangan pertumbuhan PDRB menunjukkan kepada kita bahwa corak perencanaan serta pembangunan yang dilakukan tiap daerah berbeda-beda. Seharusnya tiap daerah kabupaten harus mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, hal ini harus dilakukan untuk menyongsong otonomi daerah, dimana daerah dituntut secara aktif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Jika pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat dapat ditingkatkan, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan PDRB propinsi Jawa Barat. Berikut ini pada tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi propinsi yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tiap tahun kecuali pada tahun 1998 dimana hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1999 dan 2000, bangsa Indonesia masih mengalami krisis tetapi sudah mulai menyesuaikan dari tahun 1998 (mengalami kenaikan kembali).

Tabel 1.2
PDRB Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983 dan 1993
(Total PDRB)

Tahun	PDRB Total (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1990	17.959.098	-
1991	19.195.892	6,88
1992	20.582.897	7,22
1993	53.939.673	162,06
1994	57.823.106	7,20
1995	62.491.165	8,07
1996	68.243.530	9,20
1997	71.568.924	4,87
1998	58.847.841	-17,77
1999	60.200.705	2,30
2000	63.149.580	4,90

Sumber : BPS Berbagai terbitan

Dari tabel diatas harus dilihat kembali untuk menginstrospeksi perencanaan dan strategi pembangunan masing-masing, sekaligus agar mengevaluasi setiap pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat mengetahui sektor-sektor kegiatan ekonomi yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dalam menyongsong Otonomi Daerah, kabupaten Subang yang terdiri dari 22 kecamatan dan 252 desa sejak otonomi daerah berlaku, tentunya secara aktif menggiatkan pembangunan di daerahnya dengan memaksimalkan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya. Kabupaten Subang yang terkenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat bahkan se-Indonesia diharapkan dapat terus menjadi sektor ekonomi unggulan dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Berikut ini pada tabel 1.3 dapat dilihat pertumbuhan PDRB kabupaten Subang,

Tabel 1.3
PDRB KABUPATEN SUBANG
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
MENURUT LAPANGAN USAHA 1996-2000
(JUTAAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	677.066	683.588	674.626	691.916	710.404
2. Penggalian	2.194	2.449	1.622	1.464	1.483
3. Industri Pengolahan	127.895	127.382	90.775	87.289	89.728
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	9.102	9.881	10.977	12.373	14.792
5. Bangunan/Konstruksi	93.166	97.307	62.201	60.564	61.927
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	465.825	490.561	466.737	482.255	506.163
7. Pengangkutan dan Komunikasi	42.678	45.672	48.359	49.245	54.237
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	36.009	39.570	24.433	24.457	26.562
9. Jasa-jasa	213.794	226.007	219.162	225.715	237.217
PDRB	1.667.729	1.722.417	1.598.892	1.635.276	1.702.513

Sumber : BPS, PDRB kabupaten Subang (Berbagai Terbitan)

Dari tabel 1.3 dapat memberikan gambaran tentang PDRB kabupaten Subang, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan paling besar dari tahun-ketahun. Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran sumberdaya manusianya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan, serta memelihara sumberdaya alam yang tersedia secara efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan faktor penting guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berarti pula dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan setiap sektor ekonomi dapat ditingkatkan, misalnya sektor penggalian yang merupakan sektor paling kecil peranannya terhadap PDRB kabupaten Subang, hal tersebut tentunya sangat mendukung adanya peningkatan PDRB kabupaten Subang. Kemudian pada tabel 1.4 dapat dilihat pertumbuhan

ekonomi kabupaten Subang yang mengalami kenaikan tiap tahun kecuali pada tahun 1998, dimana hal ini akibat dari krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia, tetapi pada tahun 1999 hingga 2000 PDRB kabupaten sudah dapat menyesuaikan dan mengalami kenaikan kembali.

Tabel 1.4
PDRB KABUPATEN SUBANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
TAHUN 1993-2000 (JUTAAN RUPIAH)

TAHUN	TOTAL PDRB	PERTUMBUHAN (%)
1993	1.378.375	-
1994	1.453.585	5,54
1995	1.553.002	6,84
1996	1.667.729	7,39
1997	1.722.417	3,28
1998	1.598.892	-7,17
1999	1.635.276	2,27
2000	1.702.513	4,11

Sumber : BPS. PDRB kabupaten Subang

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang serta kurang jeli nya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-pergeseran sektor-sektor ekonomi dari tahun-ketahun. Di sinilah peran Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) cukup dominan dalam menentukan arah serta rencana pembangunan di daerah agar pembangunan di daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang di inginkan.

Tujuan akhir pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan meningkatnya PDRB.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “**Analisis Pergeseran Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Subang (Periode Tahun 1993-2002)**”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang pada tahun 1993-2002 berdasarkan analisis *Shift-Share* ($S - S$) ?
2. Bagaimana Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang di bandingkan struktur ekonomi propinsi Jawa Barat ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pergeseran sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang tahun 1993-2002 dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi propinsi Jawa Barat berdasarkan metode analisis *Shift - Share* ($S - S$).
2. Untuk menganalisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi kabupaten Subang tahun 1993-2002 dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi propinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk :

1. Bagi penulis merupakan bentuk aplikasi dari ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah.
2. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu hanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

1.5.2. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang bertujuan agar mendapat literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang relevan antara lain buku terbitan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) serta instansi-instansi lainnya.

1.5.3. Data Yang Dibutuhkan

- PDRB Kabupaten Subang 1993-2002.
- PDRB Propinsi Jawa Barat 1993-2002.

1.5.4.Sumber Data

- BPS Propinsi Yogyakarta.
- BPS Propinsi Jawa Barat.
- BPS Kabupaten Subang.
- BAPEDA Propinsi Jawa Barat.
- BAPEDA Kabupaten Subang.
- Perpustakaan Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

1.5.5.Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sektor-sektor ekonomi di kabupaten Subang propinsi Jawa Barat.

1.6.Metode Analisis Data

1.6.1 Metode analisis secara deskriptif atau metode kualitatif, yaitu metode yang tidak menggunakan rumus-rumus, tetapi sifatnya berupa penjelasan dan keterangan pelengkapannya.

1.6.2 Metode analisis kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan rumus tertentu yang sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis Perencanaan Pembangunan yaitu *Shift-Share (S S)*. Teknik analisis *Shif-Share* adalah suatu teknik analisis di dalam perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa pasar masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih rendah hirarkis tumbuh dari tahun-ketahun terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi secara hirarkis.

Pergeseran (*Shift*) sektor-sektor perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonominya dapat dilihat dengan membandingkan laju pertumbuhan sektor ekonomi daerah dengan daerah yang secara hirarkis lebih tinggi. Teknik *Shift Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh pertumbuhan propinsi disebut pengaruh pangsa (*Share*), bauran industri (M). Pengaruh bauran industri disebut bauran komposisi (*Proporsional Shift*) dan keunggulan kompetitif (C). pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share*, karena itulah teknik analisis ini dinamakan teknik analisis *Shift Share*. Menurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum persamaan dari analisis *Shift Share* dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

i : Sektor-sektor ekonomi yang diteliti.

J : Wilayah yang diteliti.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan per sektor yang dikonotasikan sebagai (Y) :

$$D_{ij} = Y_{ij} - Y_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot m \dots \dots \dots (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - m) \dots \dots \dots (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots \dots \dots (5)$$

dimana :

r_{ij} , r_{in} , dan r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan nasional yang masing-masing di definisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{(Y^*_{ij} - Y_{ij})}{Y_{ij}} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_{in} = \frac{(Y^*_{in} - Y_{in})}{Y_{in}} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = \frac{(Y^*_n - Y_n)}{Y_n} \dots\dots\dots (8)$$

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan :

- D : Variabel Wilayah.
- N : Pertumbuhan Nasional.
- M : Bauran Industri/Industri Campuran.
- r_{ij} : Pertumbuhan Sektor i di wilayah j .
- C : Keunggulan Kompetitif (*Regional Share*).
- r_{in} : Pertumbuhan i di tingkat Nasional.
- r_n : Pertumbuhan Regional.
- Y_{ij} : Pendapatan Sektor i di Wilayah j .
- Y_{in} : Pendapatan Sektor i di Tingkat Regional.
- Y_n : Pendapatan Regional.
- Y^* : Pendapatan Tahun Terakhir Analisis.

Kemampuan teknik analisis *Shift-Share* untuk memberikan dua indikator positif yang berarti bahwa suatu wilayah mengadakan spesialisasi di sektor-sektor yang berkembang secara nasional (*Industry-mix effect*) dan bahwa sektor-sektor dari perekonomian wilayah telah berkembang lebih cepat daripada rata-rata nasional untuk sektor-sektor itu (*competitive advantage effect*). Teknik analisis *Shift-Share* tidaklah lepas dari kekurangan-kekurangan/keterbatasan-keterbatasan.

Keterbatasan-keterbatasan teoritikal dari metode analisis *Shift-Share* adalah :

1. Analisis *Shift-Share* tidak lebih daripada suatu teknik pengukuran atau prosedur baku untuk mengurangi pertumbuhan suatu variabel wilayah menjadi komponen-komponen. Persamaan *Shift-Share* hanyalah suatu *Identity equation*, itu hanyalah suatu jodi, tidak mempunyai implikasi-implikasi keperilakuan. Metode *Shift-Share* tidak untuk menjelaskan mengapa, misalnya pengaruh keunggulan kompetitif adalah positif di beberapa wilayah, tetapi negatif di daerah-daerah lain. Metode *Shift-Share* merupakan teknik pengukuran yang suatu sistem akunting dan tidak analitik.
2. Komponen pertumbuhan nasional (N_{ij}) secara implisit mengemukakan bahwa tiap industri di suatu wilayah hendaknya tumbuh pada laju nasional atau dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan nasional. Selain terlalu sederhana, gagasan demikian dapat membuat kabur sebab-sebab pertumbuhan wilayah.

3. Arti ekonomi dari dua komponen *Shift* tidak dikembangkan dengan baik. Keduanya berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sama. Perilaku ekonomi yang melandasi kedua macam *Shift* tidak mudah dapat dipisahkan dan dibedakan, yakni : perubahan penawaran dan permintaan, perubahan teknologi, dan perubahan lokasi.
4. Teknik analisis *Shift-Share* secara implisit mengambil asumsi bahwa semua barang dijual secara nasional. Padahal tidak semua demikian. Bila pasar suatu barang bersifat lokal, maka barang itu tidak bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang menghasilkan barang yang sama atau tidak dapat berharap untuk memperoleh bagian dari kenaikan permintaan agregat (Prasetyo Soepono, 1993).

Sedangkan dalam penelitian ini digunakan asumsi sebagai berikut :

1. Selera pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain diseluruh Indonesia sama.
2. Setiap penduduk ditiap-tiap wilayah mempunyai pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama dengan pola permintaan barang dan jasa di tingkat nasional.
3. Tingkat rata-rata untuk setiap masing-masing barang dan jasa disetiap daerah sama.

1.7. Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**
- Bab ini berisi latar belakang, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** **Kajian Pustaka**
- Bab ini berisi kajian pustaka hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
- BAB III** **Landasan Teori**
- Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti dan hipotesis penelitian.
- BAB IV** **Gambaran Umum Subyek Penelitian**
- Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai kondisi dari berbagai aspek seperti letak dan luas monografi, keadaan ekonomi, penduduk serta tenaga kerja.
- BAB V** **Analisis Data dan Pembahasan**
- Bab ini memuat tentang apa yang telah dibahas pada bab terdahulu dan analisis dari hasil penelitian.
- BAB VI** **Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan**
- Bab ini berisikan kesimpulan yang telah diambil dari tulisan yang dibuat, dan implikasi kebijakan yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil yang dibuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dari literatur yang relevan dengan analisis yang digunakan, dan dasar-dasar teori dari sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang pernah ada yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan maksud untuk dijadikan bahan acuan dan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini berusaha untuk mencari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing peneliti sebelumnya. Bercermin dari hasil penelitian sebelumnya tersebut, selanjutnya berusaha untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian yang meliputi, waktu serta tempat penelitian yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain :

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto (“Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia”-Pasca Krisis : 95-100) di kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan judul “Prospek Sektor Pada Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia” Pasca Krisis Ekonomi Berdasarkan Analisis *Shift-Share*.

Potensi ekonomi kabupaten Kotabaru dapat dilihat dari sumbangan sektoral terhadap PDRB, yang masih menempatkan sektor pertambangan dan

penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor industri pengolahan.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 1998 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sementara sektor-sektor lainnya mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yaitu 1993 menunjukkan hanya 3 sektor yang mengalami pertumbuhan, yakni pertanian 23,4%, pertambangan dan penggalian 28,0%, dan, perdagangan, hotel dan restoran 16,7%. Sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami penurunan pada puncak krisis ekonomi tahun 1998. Pertumbuhan negatif terbesar dialami oleh sektor bank dan lembaga keuangan lain sebesar 53,3%, disusul sektor bangunan -51,3%, sektor jasa -30,3%, sektor listrik, gas, dan air bersih -27,1%, sektor pengangkutan dan komunikasi -2,8%, dan sektor industri pengolahan -1,2%.

Pada tingkat nasional tercatat pertumbuhan sektor-sektor PDRB -14% pada tahun 1998, maka kabupaten Kotabaru mencatat pertumbuhannya positif pada pertambangan. Dengan angka pertumbuhan tersebut terlihat betapa besar peran tambang dalam perekonomian daerah Kotabaru. Sayangnya pertambangan batubara pada Mei 2000 sedang menghadapi masalah rumit, terutama pertambangan rakyat dan bahkan kemungkinan eksploitasi tambang batubara akan ditutup. Secara absolut dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 1993 nilainya adalah Rp.1463 Milyar, naik 7,63 % dari tahun 1997 sebesar Rp. 1359 Milyar.

Dalam penelitian Sri Kusriani Tri Yuniati (1997) “Arah Pergeseran Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasarkan dari hasil analisis *Shift-Share* yang dilakukan tampak bahwa dalam PDRB DIY sektor yang menjadi basis ekonomi atau sektor unggulan adalah sektor jasa dan sektor industri pengolahan. Selain itu dari analisis *Shift-Share* tampak pula ketidak unggulan kompetitif sebagai komponen ketiga dari tambahan pendapatan di daerah DIY yang tidak setara dengan pertumbuhan nasional, dijumpai pada sektor pertanian, listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan perusahaan.

Jadi ada 3 sektor dari 9 sektor ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkembang lebih lambat dari laju pertumbuhan nasional rata-rata sektor ini. Dan Sri Kusriani Tri Yuniati ini menemukan sebuah indikasi bahwa telah terjadi pergeseran dalam posisi kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dari sektor pertanian ke sektor industri.

Sedangkan penelitian lainnya yakni oleh Heriyanto (1999) dengan “Analisa Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Jambi Periode 1988-1997. Berdasarkan analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Jambi adalah positif. Demikian juga dilihat dari pengaruh komponen pertumbuhan nasional, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Jambi pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan kontribusi sektor-sektor ekonomi secara nasional.

Serta penelitian Yuman Idris (1997) “Analisa Struktur Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Aceh”. Penelitian ini menggunakan 2 alat analisa yaitu *Shift-Share* dan *Location Qoutient*. Adapun kesimpulan dari ini, dalam strutur

perekonomian Aceh tahun 1983-1993 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang kontribusinya terbesar dalam pembentukan PDRB. Berdasar analisis *Shift-Share* tahun 1983-1993 menunjukkan bahwa total laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh adalah positif, kalau dilihat dari komponen pertumbuhan nasional maka sektor-sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh juga positif. Dilihat dari pengaruh komponen bauran, komponen bauran industri menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalan, sektor sewa rumah, sektor pemerintahan dan pertahanan, serta sektor jasa-jasa menunjukkan kontribusi yang negatif, ini berarti pertumbuhan sektor-sektor lebih lambat dari sektor-sektor sejenis secara nasional. Sedangkan sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta bank dan lembaga keuangan menunjukkan nilai positif.

Dilihat dari pengaruh keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan untuk sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor bank dan lembaga keuangan, sektor pemerintahan dan pertahanan, serta sektor jasa-jasa menunjukkan positif, sedang sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan sektor sewa rumah adalah negatif. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan sektor ekonomi Daerah Istimewa Aceh menunjukkan nilai positif. Sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang berperan paling besar terhadap

pembentukan PDRB disusul sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Berdasarkan analisis *Location Qoutient (LQ)* sektor yang paling potensial dan paling dapat diandalkan dalam pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Aceh selama tahun 1983-1993 adalah sektor pertambangan dan penggalian.